

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Pemahaman masyarakat tentang politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Pada 2014.**

Pemahaman masyarakat Poreh tentang politik uang sangatlah bervariasi, ada yang memahami sebagai sogok-menyogok, ada yang memahami sebagai sedekah politik dan ada yang memahami sebagai tali-kasih, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

##### **a. Pemahaman sogok menyogok.**

Masyarakat yang memahami politik uang sebagai sogok menyogok sangat antipati terhadap politik uang, karena mereka mengembalikan persoalannya kepada hadits Nabi bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan. Dengan demikian, masyarakat yang memahami politik uang sebagai sogok menyogok menolak politik uang, karena takut dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

##### **b. Pemahaman sedekah politik.**

Berbeda dengan masyarakat yang memahami politik uang sebagai sedekah politik, karena kalau masyarakat yang memahami politik uang sebagai sedekah politik maka mereka harus mengambalnya, tidak baik menolak pemberian dari orang lain.

c. Pemahaman tali-kasih.

Pemahaman tali-kasih dilontarkan pertama kali oleh kalangan tokoh masyarakat yang mempunyai madrasah, pada saat menjadi penasehat dari tim pemenangan kandidat yang bersimbol pisang, dia mengatakan bahwasanya orang yang sudah menerima uang setelah acara ini diharuskan memilih kandidat yang bersimbol pisang, karena kalau tidak orang tersebut termasuk orang munafik alasannya dia sudah dipercaya memilih kandidat yang bersimbol pisang, tapi kenyataannya dia berkhianat sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW bahwasanya tanda-tanda/ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar dan jika dipercaya ia berkhianat.

**2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada 2014.**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti aktualisasikan ada tiga faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang yaitu :

a. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi, ternyata masyarakat di Desa Poreh secara ekonomi menengah kebawah dapat dibuktikan bahwasanya dari segi profesi masyarakat Poreh kebanyakan buruh taninya, maksudnya buruh yang tidak mempunyai lahan ataupun sawah untuk bercocok tanam. Sehingga kondisi tersebut menjadikan lahan yang subur untuk memudahkan masyarakat Poreh menerima sekaligus mengharap pemberian dari kandidat pada saat pemilihan umum.

b. Kondisi perubahan pemahaman tentang politik uang

Perubahan pemahaman ini diaktualisasikan oleh kalangan tokoh masyarakat, sehingga politik uang biasanya dipahami sebagai sogok menyogok tidak diperbolehkan oleh agama dan negara, menjadi tali-kasih yang mengharuskan masyarakat menerima uang dari tim pemenangan kandidat untuk memilihnya. Pemahaman selanjutnya juga diberikan oleh salah satu tim sukses bahwasanya kandidat yang memberikan uang pada saat pemilihan umum haruslah diterima karena itu merupakan rezeki yang tidak boleh ditolaknya. Kandidat ikhlas dalam memberinya, apalagi kandidat memang sengaja dalam bersedekah, jadi harus diterimanya. Tidak baik menolak pemberian orang yang mau bersedekah.

c. Kondisi keagamaan

Kondisi keagamaan, dalam hal ini, masyarakat masih kurang memahami terhadap doktrin ajaran Islam. Sehingga masyarakat Poreh

yang agamis, mudah ikut-ikutan dalam menerima politik uang, karena bagi masyarakat itu sesuai dengan ajaran Islam, padahal kalau dikaji lebih dalam lagi politik uang sangatlah kontra dengan doktrin Islam, karena dalam Islam, politik uang identik dengan sogok-menyogok yang dibenci sekaligus dilaknat oleh Allah SWT.

## **B. Saran**

Dalam bagian ini, penulis akan memberikan saran terhadap berbagai macam kalangan yaitu :

1. Bagi pemerintah, hendaknya meningkatkan sosialisasi politik (pendidikan politiknya) kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memproduksi budaya politik yang partisipan dan menjadi perilaku memilih yang rasional dan kritis.
2. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, sudilah kiranya memberikan penyuluhan pemahaman yang sebenarnya terkait politik uang, agar masyarakat dapat memahami secara komprehensif tentang politik uang. Sehingga masyarakat akan menghindar dari politik uang.
3. Bagi tokoh masyarakat, hendaknya memahami secara utuh terkait doktrin agama Islam, agar tidak salah paham dalam mengartikan politik uang.
4. Bagi masyarakat, hendaknya menghindar dari politik uang walaupun dalam bingkai pemahaman apapun, karena bukan hanya hukum agama Islam yang melarang, melainkan hukum negara juga tidak memperbolehkannya.

5. Bagi para pembaca, hendaknya dapat mengambil manfaat dari pada hasil penelitian ini, sehingga dapat mengetahui secara komprehensif terkait politik uang dalam agama Islam dan politik uang dalam konstitusi.